

PEMIKIRAN AGUS WIRAHADIKUSUMAH SEBAGAI TOKOH REFORMIS MILITER INDONESIA TAHUN 1998 – 2000

Tegar Haedar ¹, Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo ², Rikza Fauzan ³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : tegarhaedar96@gmail.com, umarhadiwibowo90@untirta.ac.id,
rikza.fauzan@untirta.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemikiran Agus Wirahadikusumah sebagai tokoh reformis militer Indonesia tahun 1998 – 2000. Bentuk penelitian ini adalah narasi deskripsi dengan pendekatan melalui metode historis. Metode penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari Heuristik, kritik yang terbagi menjadi kritik internal maupun eksternal sumber. Interpretasi dan Historiografi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori orientasi militer Amos Perlmutter. Agus Wirahadikusumah memiliki latar belakang keluarga militer. Ia adalah keponakan Umar Wirahadikusumah yang merupakan Panglima Kostrad kedua dan Wakil Presiden keempat Republik Indonesia. Agus Wirahadikusumah yang merupakan alumni Akademi Militer Nasional di Magelang tahun 1973. Ia sempat mengenyam pendidikan di *John F Kennedy School Government Harvard University* Amerika Serikat dan lulus pada tahun 1992 dengan gelar *Master of Public Administration*. Sifat Agus Wirahadikusumah terlihat idealis dalam memandang reformasi internal militer menjadikan ia tokoh reformis militer Indonesia cukup mencolok. Berbeda dari kebanyakan perwira yang terkesan konservatif yang mencoba menjaga marwah militer Indonesia. Sikap Agus Wirahadikusumah bertindak sebaliknya salah satunya membongkar skandal korupsi di tubuh Kostrad saat menjadi Panglima Kostrad. Pada akhirnya Agus Wirahadikusumah tidak memiliki jabatan apapun pasca dicopot dari Panglima Kostrad pada agustus 2000. Ditengah pengasingan di tubuh militer ia memilih membuat buku religius dan memperdalam sisi spiritualnya hingga pada akhirnya ia meninggal pada 31 agustus 2001 setahun setelah pencopotannya sebagai Panglima Kostrad.

Kata Kunci: Pemikiran Agus Wirahadikusumah, Militer Indonesia 1998 – 2000, Reformis

Abstrak : *This study aims to describe the thoughts of Agus Wirahadikusumah as an Indonesian military reformist figure in 1998 – 2000. The form of this research is narrative description with an approach through historical methods. This research method uses historical methods consisting of heuristics, criticism which is divided into internal and external sources. Interpretation and Historiography. The theory used in this research is Amos Perlmutter's theory of military orientation. Agus Wirahadikusumah has a military family background. He is the nephew of Umar Wirahadikusumah who is the second Commander of Kostrad and the fourth Vice President of the Republic of Indonesia. Agus Wirahadikusumah who is an alumni of the National Military Academy in Magelang in 1973. He had studied at the John F Kennedy School Government Harvard University in the United States and graduated in 1992 with a Master of Public Administration degree. Agus Wirahadikusumah's apparent idealistic nature in viewing internal military reform made him a prominent figure in Indonesian military reform. Different from most officers who seemed nervous trying to maintain the dignity of the Indonesian military. Agus Wirahadikusumah's attitude was precisely one of his actions was a corruption scandal within Kostrad when he was Commander of Kostrad. In the end, Agus Wirahadikusumah did not hold any position after being removed from the Kostrad Commander in August 2000. While in exile in the military, he chose to make religious books and deepen his spiritual side until he finally died on August 31, 2001 a year after his removal as Commander of Kostrad.*

Keywords: *Thoughts of Agus Wirahadikusumah, Indonesian Military 1998 – 2000, Reformist*

PENDAHULUAN

Reformasi berasal dari bahasa latin *reformato* yang berarti perbaikan atau perubahan dari apa yang salah, korup, tidak memuaskan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi

ke-5 Reformis adalah orang yang menganjurkan atau yang mendukung reformasi. Terdapat cukup banyak tokoh militer yang menjadi sorotan pada masa transisi (1998-2000) berada di pucuk pimpinan militer Indonesia seperti Jenderal Wiranto, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agus Widjojo, Mayjen Agus Wirahadikusumah.

Mereka ini berada di lingkaran pimpinan militer saat itu dan pemikiran mereka dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan reformasi internal militer. Mereka merupakan tokoh reformis militer Indonesia yang berniat mengakhiri dominasi penerapannya peran Sospol militer semasa Orde Baru. Salah satu perwira reformis tersebut adalah Mayor Jenderal Agus Wirahadikusumah. Ia adalah satu dari sekian banyak Jenderal intelektual militer yang pernah dimiliki Indonesia. Pemikirannya yang reformis dapat dilihat jauh sebelum reformasi 1998, sebagai contoh dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Boston, pada tahun 1991, Agus Wirahadikusumah telah berani mengatakan ketidaksetujuannya atas *doktrin* Dwi Fungsi. Padahal saat itu Presiden Soeharto masih berada di puncak kekuasaannya dan Agus Wirahadikusumah masih berpangkat Letnan Kolonel (Tempo 2019, 117).

Saat menjadi guru militer di Seskoad, Agus Wirahadikusumah bersama rekan seangkatannya Susilo Bambang Yudhoyono sering melakukan diskusi dan membuat orasi ilmiah yang tentu dapat mengasah intelektualitas mereka. Mantan DanSeskoad periode 1992-1993, Mayor Jenderal (Purn) Herman Musakabe menyaksikan para perwira dosen Seskoad membentuk suatu badan ekstra struktural bernama Forum Pengkajian Seskoad. "...Diskusi dilakukan pada sore atau malam hari di Kampus Seskoad (untuk menghindari suasana formal kedinasan yang kaku) para perwira dibiasakan menerima perbedaan pendapat. Agus adalah sekretaris forum dan ia menyukai tugas itu serta bekerja semaksimal mungkin.." (Musakabe 2001).

Berawal dari diskusi dan orasi ilmiah yang sering dilakukan timbul daya kritis terhadap kondisi keadaan bangsa. Agus Wirahadikusumah gemar menulis sejak berada di Seskoad yang merupakan lembaga pendidikan tertinggi Angkatan Darat ini menertibkan tulisannya berjudul 'Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad 1992-1993' terbit tahun 1993. Kemudian pada masa transisi reformasi Indonesia menerbitkan tiga buku karya pemikirannya berserta Alumni AKABRI 1973 lainnya yang memiliki kesamaan pandangan mengenai reformasi militer Indonesia. Buku-buku tersebut yaitu ABRI Profesional dan Dedikatif (1998), ABRI dan Agenda Perubahan (1999), Indonesia Baru dan Tantangan TNI (1999).

Khusus dalam buku terakhir terlihat bagaimana ia menuangkan ide-idenya layaknya seorang filsuf. Ia menjelaskan perbedaan konsep realitas kultural dan realitas natural yang terjadi di Indonesia selama pemerintah otoriter militer Orde Baru (Wirahadikusumah, 1999, 313). Pemikiran Agus Wirahadikusumah yang visioner disebabkan pengalaman empirisnya yang pernah menempuh pendidikan lanjutan kecabangan militer di Amerika Serikat dan Australia, juga mendapatkan gelar Magisternya di Universitas Harvard Amerika Serikat dengan gelar *Master of Public Administration* pada tahun 1992. Kedua negara Barat tersebut tentunya beorientasi kontrol sipil atas militer atau disebut supremasi sipil. Pendidikan luar negeri yang Agus Wirahadikusumah terima bersumber dari *International Military Education and Training (IMET)*. Sejak 1950 lebih dari 4000 perwira militer Indonesia mengikuti program beasiswa *IMET* yang merupakan bantuan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia baik berupa pelatihan dan pendidikan kemiliteran maupun umum (Haseman 2006, 120).

Program beasiswa ini bertujuan mengirim para perwira militer Indonesia terpilih untuk belajar mengenai ilmu militer maupun ilmu bidang umum lainnya. Clarke dkk (Inkiriwang 2020, 3) mengemukakan bahwa Kongres (Badan Legislatif/Parlemen AS) memainkan peran penting dalam menyetujui program *IMET* untuk negara mitra seperti Indonesia. Setiap program *IMET* yang direncanakan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan harus disetujui oleh Anggota Kongres. Peran anggota Kongres AS ini menandakan adanya kontrol sipil yang demokratis dalam mengawasi program *IMET*.

Dengan demikian hampir semua perwira reformis militer Indonesia saat itu merupakan lulusan dari program *IMET*. Mereka mendapatkan pengaruh pemikiran dan *role model* untuk menerapkan supremasi sipil yaitu kontrol sipil atas militer seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu militer professional seharusnya bertugas hanya sebagai unsur pertahanan meninggalkan urusan politik kepada pihak sipil.

Dalam upaya realisasi untuk mendukung supremasi sipil dan terciptanya masyarakat madani (*Civil Society*) menurut Mayjen Agus Wirahadikusumah "Di Jawa tidak perlu lagi ada Kodam (Komando Daerah Militer). Kodam hanya diperlukan di daerah-daerah yang jangkauan pemerintah daerahnya terbatas." (Shambazy 1999). Dalam pengamatannya masyarakat di pulau Jawa sudah berkembang dan tidak perlu pengawasan unsur militer di kehidupan masyarakat seperti yang diterapkan pada Orde Baru.

Pemikiran Agus Wirahadikusumah nampaknya tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian besar rekan dan seniornya di tubuh militer saat itu. Karena salah satu dampak perubahan itu mencakup perubahan struktural organisasi secara massif yang mengakibatkan banyak personil teritorial kehilangan pos jabatan yang dulu dimiliki saat orde baru. Jumlah Personil Teritorial pada masa awal reformasi adalah 57.727, jika kisaran norma pensiun/purna tugas setiap tahunnya sebesar 6000-7000 orang. Maka dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menliquidasi satuan teritorial tersebut (TNI 2001, 32).

Manuver ini kemudian memancing perlawanan dari perwira konservatif yang menentang ide-ide progresifnya dalam mereformasi internal militer. Komando Teritorial (Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa) merupakan sumber daya politik terpenting yang dimiliki oleh militer Indonesia dalam membendung upaya pemberontakan yang terjadi di daerah. Tindakan Agus Wirahadikusumah yang cenderung terlalu berani bahkan melebihi rekan perwira reformis lainnya dalam menangani permasalahan internal institusinya. Konsep pemikiran ini menjadikan perdebatan di kalangan perwira militer khususnya para perwira senior konservatif di tubuh militer.

Pandangan dan pemikirannya Agus Wirahadikusumah lainnya dapat dilihat dari karya tulisnya maupun pernyataan di media massa dengan melalui wawancara maupun diskusi publik selama 1998-2000 yang akan menjadi bagian dari sumber penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik dalam mengangkat tema pemikiran Agus Wirahadikusumah sebagai tokoh reformis militer Indonesia tahun 1998-2000 dalam merespon reformasi internal lembaganya (ABRI). Menurut hemat penulis pemikiran Agus Wirahadikusumah yang progresif dan terkesan radikal dalam transisi militer Indonesia pada awal reformasi menarik untuk dikaji. Perlunya mengetahui latar belakang kehidupan keluarga dan pendidikan mapun karir Agus Wirahadikusumah dengan menelusuri aspek biografisnya dapat membantu menjelaskan dasar pemikiran reformis militernya terbentuk.

Pendekatan politik militer akan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami jiwa zaman akibat tidak stabilnya situasi politik nasional khususnya dalam militer Indonesia 1998-2000. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode *historis* untuk merekonstruksi *problem* yang akan dikaji dalam skripsi ini. Dengan beberapa tahapan yang meliputi, *heuristik*, kritik sumber internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Kemudian sumber dalam penelitian *historis* ini adalah sumber tertulis (*literature sources*) sumber pengamatan lapangan (*observation of field sources*) dan sumber lisan (*Interview sources*).

Beranjak dari latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar Pendidikan dan Keluarga Agus Wirahadikusumah.
2. Mengetahui karir Agus Wirahadikusumah.
3. Mengetahui pemikiran Agus Wirahadikusumah sebagai tokoh reformis internal militer Indonesia.

METODE PENELITIAN

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, metode penelitian ini menggunakan Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman 2018, 24). Terdapat 4 tahapan dalam penelitian sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik Sumber Internal maupun Eksternal, Interpretasi dan Historiografi. Teori yang digunakan adalah sejarah pemikiran Sartono Kartodirjo dan *The arbitrator – type of praetorian army* (tipe tentara pretorian penengah) Amos Perlmutter.

Hanya manusiahiduplah yang bertindak, merasa, dan berpikir, kemudian ketika mereka berlalu atau meninggal dari lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, semua fakta yang tampak sebenarnya bersumber pada atau ekspresi dari apa yang terjadi dalam mental orang, antara lain pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala macam unsur kesadaran (Kartodirjo 1993, 176).

Mentifact/Fakta Mental, seperti halnya *artifact*, harus dianggap sebagai ciptaan yang murni impersonal, entitas dalam dirinya sendiri; sedangkan perasaan dan keyakinan adalah keadaan atau kondisi atau aktivitas pikiran atau pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang memilikinya (Gnoli 2018, 6).

Mentifact hanya dapat identifikasinya apabila ditempatkan dalam suatu konteks sosio-kultural. Sosio-kultural merupakan bagian dari *sociofact* yang menjadi salah satu poin dalam pembahasan sejarah pemikiran. Perlu dilacak bagaimana ikatan kultural pemikir tercermin dalam bentuk pikirannya, baik ciri-ciri maupun strukturnya, etos hidup atau pandangan dunia (*Weltanschauung*, *Weltbild*), kosmologi serta etosnya, yang senantiasa mengerangkai alam pikirannya (Kartodirjo 1993, 181). Sudah barang tentu aspek biografis dapat membantu dalam mengidentifikasi itu (*mentifact*).

Amos Perlmutter dalam jurnal (*The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities* 1969, 392). Pretorianisme militer atau pretorian tentara terbagi menjadi dua yaitu *The ruler – type of praetorian army* (tipe tentara pretorian penguasa) dan *The arbitrator – type of praetorian army* (tipe tentara pretorian penengah). Dalam penelitian ini teori yang didalami adalah tentara pretorian penengah. Ciri-Ciri tipe militer ini adalah :

1. Berorientasi Profesional (Pemahaman penuh dengan tugas pokok sebagai militer yaitu menguasai alat-alat kekerasan) dan bersifat konservatif terhadap otonomi internalnya yang eksklusif / *corporate professionalism*.
2. Tidak secara mandiri sebagai organisasi politik (*client* Negara) dan rendah minat membuat ideologi politik.
3. Memberikan batas waktu untuk mengatur transisi penyerahan kekuasaan kepada rezim pemerintah sipil yang sah dan kembali ke barak.
4. Tidak menghilangkan seluruh pengaruh politiknya saat kembali ke barak, karena bertugas sebagai penjaga kekuasaan sipil dan stabilitas politik

Contoh Tipe tentara pretorian penengah ini dapat di lihat dari proses terbentuknya konsep jalan tengah “*Army Middle Way*” yang dicetuskan Jenderal A.H. Nasution (1958). Nasution menyebutkan bahwa “militer bukan sekedar alat pemerintah sebagaimana berlaku di negara-negara barat, bukan pula alat partai sebagaimana di negara-negara komunis, apalagi semacam rezim militer yang mendominasi negara” (Kristiadi 1999, 13)

Konsep Nasution ini sejalan dengan prinsip paradigma baru yang diusung oleh militer Indonesia generasi masa transisi reformasi pimpinan Jenderal Wiranto termasuk Agus Wirahadikusumah. Paradigma Baru ini hanya melunakan dominasi militer Indonesia dari politik

namun tidak sepenuhnya keluar dari politik. Sesuai dengan prinsip teori militer pretorian penengah. Keberadaan mereka dalam pemerintahan hanya bersifat sementara berdasarkan kesepakatan kerjasama sipil-militer untuk membantu menstabilkan politik negara dan khusus karakteristik Indonesia untuk membantu pembangunan wilayah.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Agus Wirahadikusumah

Penulis tidak dapat mendapatkan informasi dari Ahli Waris Keluarga Agus Wirahadikusumah dan berdasarkan pencarian data yang telah penulis lakukan, belum ada penulisan biografi Agus Wirahadikusumah secara lengkap. Penulis hanya mendapatkan biografi melalui sumber yang tersebar secara daring yang memiliki kelemahan tidak terlalu rinci menjelaskan latar belakang kehidupan Agus Wirahadikusumah.

Agus Wirahadikusumah lahir di Bandung, pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ke-5 dari 12 putra-putri pasangan Raden Maryun Wirahadikusumah, S.H. dan H. Siti Rokaat. Ayahnya seorang praktisi/penasehat hukum di kota Bandung pada zamannya. Kakeknya seorang *Wedana* atau pejabat pemerintahan Kolonial Belanda setingkat bupati, bernama Raden Rangga Wirahadikusumah yang saat itu kedudukan *Wedana* cukup terpandang dan terhormat dimata Masyarakat sekitar.

Masa kecilnya banyak dihabiskan bersama keluarga besarnya yang tinggal Kota Bandung. Agus Wirahadikusumah selepas lulus dari AKABRI kemudian menjalani dinas di Kodam Brawijaya Jawa Timur. Ia menikah dengan Tri Racmaningsih dan dikarunia dua orang anak. Anak pertama seorang putri bernama Dyah Gustinar Savitri, lahir pada 14 Juli 1975 dan lahir dua tahun setelahnya seorang putra bernama Yunan Mahastra Satria pada 22 Juni 1977.



Gambar 1 Keluarga besar R. Maryun Wirahadikusumah, S.H. Bandung Tahun 1960. Agus Wirahadikusumah (pojok kanan bawah) umur 9 tahun
Sumber: Instagram lilly_wirahadikusumah (<https://rb.gy/me3dy>)



Gambar 2 Agus Wirahadikusumah (pojok kanan) bersama kedua anaknya dan sang istri saat berdinasi di Pussenif dan Seskoad Bandung
Sumber: Instagram yunanwhk (<http://tinsy.me/tZRTd3>)

Setelah lulus dari SMA memasuki Akademi Militer Nasional cabang Darat di Magelang. Semasa menempuh di AKABRI Darat di Magelang ini Pratar (Prajurit Taruna) Agus Wirahadikusumah tergabung dalam Peleton tiga Kompi empat, Batalyon C-1 bersama Pratar Susilo Bambang Yudhoyono, Pratar Wresniwiro, dan Pratar Sutanto (Hisyam 2004, 84).

Angkatannya memang banyak orang pintar dan kalangan anak orang terpendang. Agus Wirahadikusumah sendiri yang merupakan keponakan Kepala Staf Angkatan Darat saat itu Letjen Umar Wirahadikusumah. Seperti Prabowo Subianto anak ekonom ternama saat itu Prof. Dr. Soemitro Djohadikusumo. Bahkan dari Angkatan ABRI Turen 1973 itu banyak taruna yang pintar-pintar dan rasa keinginan tahanan yang tinggi. Menurut Mayjen (Purn) TNI Dr. Syamsul Ma'arif, "Sejak masa Taruna pada 1972, kami sering melakukan diskusi-diskusi dengan SBY, Prabowo, dan Agus Wirahadikusumah. Ketika teman-teman pesiar pada hari Minggu, kami sering tetap berada di kampus berdiskusi" (Said 2013, 272).

Setelah lulus AKABRI tahun 1973. Agus Wirahadikusumah resmi manyandang pangkat Letnan Dua kecabangan Infanteri. Menjadi perwira muda Agus Wirahadikusumah menjalani ikatan dinas di Kodam Brawijaya di wilayah Jawa Timur. Ia paska lulus AKABRI 1973 melanjutkan pendidikan militer pada tahun pertama dinas militernya tepatnya pada tahun 1974 untuk mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri. Pada tahun 1979 mengikuti Kursus Komandan Kompi Senapan (Sudankipan), dan 1988 Kursus Komandan Batalyon Infanteri (Sudanyonif) di Pusat Pelatihan Infanteri Pussenif Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya pada awal tahun 1981, Agus Wirahadikusumah melanjutkan pendidikan militernya di luar negeri tepatnya di Amerika Serikat (Musakabe, 1993, 268).

Ia mengikuti kursus pendidikan Ranger, Airborne, Pathfinder di Fort Benning Georgia US pada tahun 1981. Dua tahun kemudian tepatnya pada 1983 kembali ke Fort Benning Georgia US untuk mengikuti pendidikan Infantry Officer Advanced Course. Kemudian pada tahun 1984 mengikuti pendidikan Air Assault di Fort Campbell Kentucky US. Pada Tahun 1985 ia kembali ke Amerika Serikat untuk untuk menimba ilmu di kursus Specialized English Course dan kursus Non-Commissioned Officer Development and Management System di Lingkungan US Army untuk tugas observasi tentang Sistem Pembinaan Bintara Penghubung yaitu suatu jabatan peran penghubung komunikasi operasi antara Perwira ke Prajurit.

Lalu pada tahun 1988 menjalani pendidikan di Seskoad Bandung dan lulus tahun 1989 yang tercantum dalam biodata alumni webside Seskoad (<https://seskoad.mil.id/index.php/alumni>). Selanjutnya menjadi dosen di lingkungan pendidikan tinggi Angkatan Darat itu sampai 1993. Namun pada tiga tahun sebelumnya tepatnya pada 1990, Agus Wirahadikusumah mengikuti pendidikan di Army Command dan Staff College di Australia.

Pendidikannya yang terakhir pada tahun 1991 di *Kennedy school of government, Harvard University* di US. Agus Wirahadikusumah kemudian lulus pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar *Master of Public Administration* (MPA). Setelah lulus dari Universitas Harvard, bersama para perwira lain yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri membentuk Forum Pengkajian Seskoad. Melalui forum pengkajian Seksoad itu pemikiran Agus Wirahadikusumah dapat dikembangkan menjadi karya tulis pribadinya.

Pendidikan militer maupun bidang umum yang tempuh Agus Wirahadikusumah diluar negeri, merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia melalui International Military Education and Training (IMET). Sejak 1950 lebih dari 4000 perwira militer Indonesia mengikuti program beasiswa IMET yang merupakan bantuan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia baik berupa pelatihan dan pendidikan kemiliteran maupun umum (Haseman 2006, 120).

Karir Agus Wirahadikusumah

Karir militer Agus Wirahadikusumah setelah lulus Akabri-Darat dengan pangkat Letda (11-12-1973). Danton di Yonif Raider Lintas Medan 509/Balawara Yudha Kodam VIII/Brawijaya (saat ini menjadi Kodam V/Brawijaya) 1974-1975. Dantonban Ki Lt Brigif 2 Kodam VIII/Brawijaya 1975-1976. Danton I/Kompi C/Yonif Raider Lintas Medan 507 (saat ini menjadi Yonif Raider 500) Kodam VIII/Brawijaya 1976-1977. Promosi menjadi Lettu (1-04-1976). Danki 0/Yonif Raider Lintas Medan 507 Kodam VIII/Brawijaya 1977-1980. Promosi menjadi Kapten (1-04-1979). Kasi Ops Yonif Raider Lintas Medan 507 Kodam VIII/Brawijaya 1980-1981. Pasi 2/Organisasi Brigif 2 Kodam VIII/Brawijaya 1981-1984.

Gumul Golongan IV di Pussenif di Cimahi Jawa Barat 1984-1985. Kasidik Bangpes Pussenif 1985-1987. Promosi menjadi Mayor (1-10-1985). Wadanyonif Linud-328 Dirgahayu/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 328/Dirgahayu) 1 Mei 1987-1 Juni 1987. Wadanyonif Linud-305 Tengkorak/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 305/Tengkorak) 1 Juni 1987-1 November 1987. Danyonif Linud-330 Tri Dharma/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 330/Tri Dharma). Danyonif Linud-330 Tri Dharma/Brigif-17 Kostrad(kini Yonif Para Raider 330/Tri Dharma/Brigrif-17 Kostrad) 1 November 1987-1 Februari 1988. Danyonif Linud-305 Tengkorak/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 305-Tengkorak Kostrad) 1 Februari 1988-1 Juli 1988. Pamen Makostrad 1 Juli 1988-1 Juni 1989. Dosen Golongan IV di Seskoad 1 Juni 1989-1 Juni 1993.

Promosi menjadi Letkol (1-10-1989). Pakor Sahli Dispenad 1 Juni 1993-1 Agustus 1994. Promosi menjadi Kolonel (1-10-1993). Asops Kasdam VII/Wirabuana 1 Agustus 1994-1 April 1995. Danrem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana 1 April 1995-1 Maret 1996. Waasrenum Pangab 1 Maret 1996-1 Januari 1998. Promosi menjadi Brigjen (1-03-1996). T.A Tk. III Sahli Pangab Bidang Polkam 1 Januari 1998-15 September 1998. Promosi menjadi Mayjen (1-01-1998). Danseskoat 15 September 1998-1 Januari 1999. Asrenum Pangab 1 Januari 1999-1 November 1999. Pangdam VII/Wirabuana 1 November 1999-1 April 2000. Pangkostrad 1 April 2000-1 Agustus 2000. Promosi menjadi Letjen (1-04-2000). Karir non-militer Agus Wirahadikusumah menjadi Manejer timnas PPSI di Thomas Cup 1998.

Pemikiran Reformis militer Agus Wirahadikusumah tahun 1998-2000

Menulis dapat menjadikan sebuah warisan pemikiran yang abadi walaupun raga kita telah tiada, jiwa kita tetap terasa hadir dari karya kita salah satunya ialah karya buku. Penulis dapat mengetahui pemikiran Agus Wirahadikusumah dari beberapa karya buku beliau. Menulis memang salah satu kegemaran beliau. Karya pemikirannya yang muncul sebagai bagian dari empat buku "Tantangan Pembangunan (Dinamika Pemikiran Seskoad 1992-1993), ABRI Profesional dan Dedikatif 1998, ABRI dan Agenda Perubahan 1999, dan Indonesia Baru dan Tantangan TNI 1999".

Pada 10 Mei 1998, ABRI berinisiatif membuat suatu Tim Perumusan Perumus Pokok-Pokok Pikiran ABRI Tentang Reformasi. Surat perintah Menhan/Pangab No: Sprin/823/P/V/1998 yang bertujuan merumuskan agenda Reformasi khususnya pada dalam internal militer Indonesia sendiri yang dapat menjadi pioner bagi setiap lembaga negara lainnya. Mayjen Agus Wirahadikusumah menjadi bagian dari Anggota Tim Perumus Reformasi internal ABRI tersebut dengan di ketuai oleh rekan seangkatan AKABRI 1973, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu Kassospol ABRI. Banyak perwira militer percaya bahwa lengsernya Suharto sudah tidak terelakkan lagi, dan bahwa militer harus melakukan penyesuaian jika ingin bertahan di bawah rezim demokratis yang baru (Mietzner 2006, 23).

Menurut Agus Wirahadikusumah bahwa "Lengsernya Presiden Soeharto berdampak besar terhadap akselerasi reformasi internal ABRI" (Shambazy 1999). Setelah Berakhirnya Orde Baru dengan lengsernya Presiden Soeharto dan naiknya B.J. Habibie secara konstitusional pada tanggal 21 Mei 1998, lahirlah era reformasi. Militer Indonesia dalam hal ini ABRI merumuskan Paradigma baru ABRI yang berisi:

1. ABRI/TNI tidak harus didepan, karena tanggung jawab bangsa dan negara bukan merupakan tanggung jawab militer semata melainkan tanggung jawab semua komponen bangsa
2. kedua, merubah konsep dari menduduki menjadi hanya mempengaruhi
3. ketiga, mengubah metode dari mempengaruhi secara langsung (*direct approach*) menjadi mempengaruhi secara tidak langsung (*indirect approach*)
4. keempat, kesiapan untuk terlibat dalam pembagian peran politik (*role sharing*) pengambilan keputusan bersama dalam hal isu-isu nasional dan pemerintahan yang penting dengan komponen bangsa lainnya (Azca 2004, 3).

Agus Wirahadikusumah menyarankan agar Mabes TNI mengadakan pelatihan dan forum tambahan untuk mengubah paradigma lama. Dalam pandangannya, mereka harus sadar bahwa keterlibatan militer dalam urusan sospol hanya melemahkan posisinya karena terjebak dalam permainan politik (Rinakit 2005, 241). Guna mensosialisasikan paradigma baru, militer dalam hal ini ABRI mengadakan kegiatan seminar bertema “PERAN ABRI ABAD XXI” yang diselenggarakan Sesko ABRI di Bandung pada 22-24 September 1998.

Kegiatan seminar ini dihadiri baik dari petinggi militer Indonesia termasuk Agus Wirahadikusumah dan Susilo Bambang Yudhoyono maupun para akademisi sipil dalam membahas reformasi internal militer Indonesia dan masa depan jalannya kehidupan bangsa. Tokoh sipil yang hadir dalam seminar seperti Salim Said, Nurcholish Madjid, Riswanda Himawan, Eep Saefulloh Fatah dan Bilveer Shingh (Hisyam 2004, 392-394). Hasil seminar tersebut dibukukan berjudul ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa yang diperkenalkan oleh Jenderal Wiranto pada saat HUT ABRI ke-53, 5 Oktober 1998. Mengusung doktrin Paradigma Baru menggantikan doktrin Dwi Fungsi.



Gambar 3. Danseskoad Mayjen Agus Wirahadikusumah bersalaman dengan Kassospol ABRI Letjen Susilo Bambang

Sumber: *SBY Sang Demokrat*, 2004

Selain seminar, upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan Paradigma baru, militer Indonesia dalam hal ini TNI setelah berganti nama dari ABRI karena terpisahnya Polri pada 1 April 1999. Mengadakan diskusi yang diikuti pada aktivis dan mahasiswa berjudul “Hubungan Sipil-Militer: Visi, Misi dan Aksi dalam Seminar Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer” di Pusat Studi Jepang, Kampus Fisip UI Depok, Selasa (25/05/1999). Agus Wirahadikusumah yang saat itu menjabat Asrenum TNI mewakili Jenderal Wiranto, mengatakan: “Perubahan itu terkait dengan aspek sosio-prikologis anggota ABRI yang selama ini menikmati 'keistimewaan'. Karena itu yang logis adalah membentuk kemitraan sipil-militer dalam bentuk *role and political sharing* sebelum militer betul-betul kembali ke barak” (Detikcom 1999).

Perlunya Revisi Doktrin Sishankamrata penafsiran ulang Komando Teritorial

Saat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Senin 13 Desember 1999, Majyen Agus Wirahadikusumah yang saat itu merupakan Pangdam Wirabuana lantang melontarkan ide tentang penciutan fungsi territorial TNI dan tegas menyatakan tak setuju dengan gagasan pemekaran kodam (Tempo 2019, 25). Karena Komando territorial tidak sesuai dengan tujuan dari UU 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Dimana pembinaan territorial dan potensi daerah harus dilaksanakan oleh pemerintah sipil. Agus Wirahadikusumah mengungkapkan “Di Jawa tidak perlu lagi ada Kodam (Komando Daerah Militer). Kodam hanya diperlukan di daerah-daerah yang jangkauan pemerintah daerahnya masih terbatas,” (Shambazy 1999).

Kodam merupakan bagian dari Komando territorial yang dimiliki militer Indonesia khususnya TNI-AD. Jika kita menarik garis sejarahnya, awalnya lahirnya struktur militer ini ada karena kondisi revolusi 1945 yang tidak stabil akibat terjadi pertempuran di berbagai daerah, membuat para *pamong praja* (pejabat sipil) meninggalkan kantor kedudukannya. Jabatan kosong itu kemudian diambil alih oleh militer Indonesia dengan menempatkan komandan regu sebagai kepala desa, komandan peleton sebagai camat, komandan kompi sebagai wedana, komandan batalyon sebagai bupati (Solichien 1998, 14).

Berikut ini dinamakan Tabel struktur Komando Teritorial mengikuti heirarki pemerintahan sipil:

Tabel 1. Strutural Komando Teritorial dan Pemerintah sipil

Provisional Gubernur	Gubernur	Komando Teritorial Militer (Kodam)
Distrik Kotamadya/Kabupaten	Walikota/Bupati	Komando Teritorial Militer (Korem/Kodim)
Sub distrik/Kecamatan*	Camat	Komando Teritorial Militer (Koramil)***
Desa**	Kepala Desa	<i>Non-Commission Officer</i> (Babinsa)***
	Rukun Warga/Rukun Tetangga	

(Azca 2004, 4)

Keterangan:

* : Penunjukkan Kepala Desa dan Camat melalui mekanisme pengangkatan langsung dari pemerintah sebelum diterapkan Undang-Undang 22 Otonomi Daerah 1999.

** : Tidak semua desa terdapat *NCO* (Babinsa). Beberapa Babinsa ini merangkap untuk membina dua bahkan lebih desa di pelosok dan daerah *remote* seperti Kalimantan dan Irian Jaya/Papua.

*** : Sama seperti Babinsa, Koramil normalnya bisa mencakup teritorialnya pada tingkat *cluster* beberapa kecamatan di area pelosok khususnya di luar Jawa.

Relatifnya untuk jenjang kepangkatan Komando Teritorial adalah Kodam—Mayor Jenderal, Korem—Kolonel, Kodim—Letnan Kolonel, Koramil—Kapten/Letnan, dan Babinsa—*NCO* Sersan.

Pola seperti ini disebut sebagai Komando Teritorial yang merupakan bagian strategi doktrin *sistem* pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dalam melawan kekuatan Belanda yang lebih superior dalam pelataran perangnya. Taktik ini cukup ampuh, Belanda dapat menguasai titik-titik kota besar termasuk ibukota negara di Yogyakarta. Namun daerah-daerah pinggiran tetap dikuasai militer Indonesia karena konsep *komando territorial* ini. Jadi terbentuknya struktur militer ini (komando territorial) karena kondisi perang dan dalam keadaan darurat. Jika saat kondisi damai

keberadaannya tidak di perlukan karena fungsi ini merupakan fungsi pemerintahan sipil.

Namun saat diterapkan pada Orde Baru, selain digunakan untuk tujuan pembangunan di daerah-daerah, satuan Teritorial TNI telah mengalami bias-bias dan memunculkan berbagai eksekusi negatif. Antara lain dalam proses-proses mobilisasi massa untuk memenangkan partai Golkar yang diproyeksikan sebagai kekuatan mayoritas tunggal dalam pemerintahan Orde Baru. Satuan teritorial harus terlibat dalam proses-proses tersebut, sebagai salah satu program dari upaya-upaya kemenangan baik dalam Pemilu maupun kebijakan politik pemerintah (Basuki 2013, 163).

Agus Wirahadikusumah mengkritik penerapan komando teritorial, dalam pandangannya "mengapa kita membutuhkan satuan teritorial di Wonosobo? Apakah ada musuh yang akan menyerang kita dari sana? Tidak, kita memiliki satuan itu karena malas, Perwira yang tidak fleksibel telah terlena bermain politik, menghasilkan uang, dan pensiun dengan jabatan sipil yang bagus. Itu tidak ada hubungannya dengan pertahanan" (Mietzner 2006, 22).

Pemikiran Agus Wirahadikusumah nampaknya tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian besar rekan dan seniornya di tubuh militer saat itu. Karena salah satu dampak perubahan itu mencakup perubahan struktural organisasi secara massif yang mengakibatkan banyak personil teritorial kehilangan pos jabatan yang dulu dimiliki saat orde baru. Jumlah Personil Teritorial pada masa awal reformasi adalah 57.727, jika kisaran norma pensiun/purna tugas setiap tahunnya sebesar 6000-7000 orang. Maka dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menliquidasi satuan teritorial tersebut (TNI 2001, 32).

Manuver ini kemudian memancing perlawanan dari perwira konservatif yang menentang ide-ide progresifnya dalam mereformasi internal militer. Komando Teritorial (Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa) merupakan sumber daya politik terpenting yang dimiliki oleh militer Indonesia dalam membendung upaya pemberontakan yang terjadi di daerah. Tindakan Agus Wirahadikusumah yang cenderung terlalu berani bahkan melebihi rekan perwira reformis lainnya dalam menangani permasalahan internal institusinya. Konsep pemikiran ini menjadikan perdebatan di kalangan perwira militer khususnya para perwira senior konservatif di tubuh militer

Struktur komando teritorial, yang merupakan tulang punggung keberadaan militer dalam kehidupan sosial-politik di daerah-daerah, tidak tersentuh selama masa pemerintahan Habibie. Sistem teritorial terdiri dari jaringan unit komando yang luas yang menjangkau dari ibukota sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, mempertahankan basis struktur komando teritorial dan kemandirian finansial yang dihasilkannya merupakan salah satu kepentingan utama militer dalam pemerintahan paska Orde Baru. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (2000) memperkirakan bahwa "lebih dari 70 persen pengeluaran pertahanan kita diperoleh dari sumber-sumber di luar APBN" di tingkat nasional dan lokal (Mietzner 2006, 21).

Pada Rapim TNI April 2000, Agus Wirahadikusumah mengusulkan untuk sebuah proyek percontohan yang bertujuan untuk membubarkan secara bertahap sebagian komando teritorial dari dua tingkat terendah babinsa dan Koramil yang anggotanya di tarik di Kodim di Jakarta dan Surabaya (Anwar 2001, 26). Jadi penghapusan Komando Teritorial secara bertahap harus di landasi dengan perubahan doktrin terlebih dahulu, sehingga penerapan praktik di lapangan akan mengikuti sesuai doktrin pertahanan militernya. Penarikan aparat teritorial di secara bertahap di wilayah yang relatif sudah maju perkembangan (Jakarta dan Surabaya), seperti *pilot project* yang di usulkan Agus Wirahadikusumah dalam Rapim TNI April 2000, upaya menumbuhkan *civil society* di masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Dalam bukunya (Wirahadikusumah, 1999, 17) menyebutkan bahwa transformasi peran militer (TNI) dalam sosial masyarakat dapat diletakkan secara proporsional dan bersifat sangat dinamis tergantung tingkat dan kemajuan masyarakat sendiri.

Kemudian ditekankan kembali oleh Agus Wirahadikusumah dalam jurnal (Rifqa Deni Amanah, Hasanuddin 2014, 9), bahwa reformasi internal militer yang merupakan bagian dari reformasi nasional dan memberikan empat pokok hal menuju Indonesia Baru (*civil society*), yaitu.

1. Perlunya menumbuhkan kesadaran baru di kalangan TNI melalui reevaluasi doktrin yang membuat TNI terlena.
2. Perubahan orientasi dan konteks dari negara kepada masyarakat terhadap implikasinya.
3. Transformasi peran TNI.
4. Perubahan yang sangat menonjol dari struktur masyarakat sebagai proses yang lebih relevan sebagai masyarakat bangsa yang pluralistik.

Khusus untuk poin pertama, re-evaluasi doktrin militer sesuai kondisi Masyarakat era reformasi. Sedangkan doktrin Sishankamrata dilahirkan pada masa revolusi 1945-1949. Jika doktrin tersebut diterapkan pada masa damai berpotensi terganggunya tatanan sosial politik bahkan kekerasan dalam masyarakat bila militer terlibat di dalam *day-to day politics*, karena militer juga memiliki fungsi sebagai *manager of violence* (penguasa senjata) seperti pada masa Orde Baru. Militer Indonesia (TNI) perlu bertindak lebih dari “Redefinisi, reaktualisasi, dan reposisi” melainkan re-evaluasi doktrin “perang rakyat semesta” konsepsi cara pandang mengenai perang (Wirahadikusumah, 1999, 9). Selama doktrin ini tidak direvisi, maka militer bisa saja kembali merebut kekuasaan. Doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan keamanan Rakyat Semesta) yang menjadi landasan pembentukan struktur organisasi militer seperti Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam, dapat menjadi alat untuk merebut kekuasaan kembali.

Pretorian penengah (Perlmutter 1969, 392) militer mengidentifikasi dirinya tidak hanya sebagai alat negara tetapi juga sebagai penjaganya (*Guardians of States*). Persepsi diri seperti itu berakar kuat pada posisi tradisional militer. Pada masa kerajaan-kerajaan Jawa dahulu, selain sebagai panglima, militer juga memegang jabatan politik seperti *temenggung* (kepala daerah) *wedana* (karasidenan) dan *adipati* (walikota). Dengan cara yang sama, militer bersikeras untuk mendirikan kembali KODAM untuk mendapatkan kembali kontrol politiknya atas masyarakat, terutama setelah pengurangan peran formalnya dalam urusan politik (paradigma baru). Langkah militer untuk mendirikan kembali KODAM, pada kenyataannya, bertentangan dengan rencananya untuk menarik diri dari urusan sosial-politik.

Kritik Pemikiran Agus Wirahadikusumah

Dukungan militer terhadap *people power* dalam hal ini mahasiswa adalah dengan dibukakannya pintu masuk utama DPR/MPR pada 18 Mei 1998 padahal saat itu dijaga ketat oleh Kopassus, sebuah satuan elit milik Angkatan Darat. Menurut (Rinakit 2005, 74) dalam sebuah wawancara dengan Agus Wirahadikusumah “Bukan Jenderal Wiranto yang memutuskan membiarkan mahasiswa masuk ke DPR/MPR, melainkan Mayjen Agus Wirahadikusumah dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dilaporkan kepada Jenderal Wiranto”.

Ini dilakukan untuk mengintensifkan tekanan kepada Presiden Soeharto untuk lengser dan membuat konflik antara Letjen Prabowo Subianto dan Presiden Soeharto karena gagal menjaga Mahasiswa masuk ke DPR/MPR menkonsentrasikan pendemo di satu tempat dan memisahkan dari perusuh. Ini menunjukkan di dalam tubuh militer terdapat faksi dalam tubuh militer. Faksi militer ini dapat kita bedakan berdasarkan respon mereka terhadap upaya reformasi internal militer.

Dikutip dari (Pusjarah TNI 2014, 41-42) terdapat tiga kelompok/faksi yang ada dalam militer saat itu. Pertama adalah kelompok konservatif/status quo, mereka ini tidak menghendaki reformasi militer. Kedua, kelompok akomodatif/moderat, adalah yang menerima reformasi militer secara gradual. Ketiga, kelompok radikal atau istilah Mayjen (Purn) Saurip Kadi sebagai kelompok progresif (Kadi 2000, 49). Menurut Professor Damien Kingsbury “Faksi di militer Indonesia sudah terlihat pada internal ABRI awal 1990an, bahkan persilihan antara ABRI dengan Soeharto terjadi pada awal hingga pertengahan 1980an” (Kingsbury 2022).

Perbedaan pendekatan mengenai reformasi militer ini menjadikan Agus Wirahadikusumah menjadikan lebih radikal, seperti menjelaskan kesalahan-kesalahan militer pada Orde Baru. Pada 26 Oktober 1999, saat peluncuran buku karyanya berjudul ‘Indonesia Baru dan Tantangan TNI:

Pemikiran Masa Depan' "Dwi Fungsi itu anak haram yang terlanjur lahir" Seru Agus Wirahadikusumah di hadapan ratusan hadirin diskusi buku "Indonesia Baru dan Tantangan TNI" di lantai empat Mandarin Hotel, Jakarta (XPOS 1999). Namun karena kritiknya tersebut yang nampak keras terhadap institusinya sendiri (TNI) tidak sejalan dengan pendapat perwira reformis lainnya.

Saat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Senin 13 Desember 1999, Majjen Agus Wirahadikusumah yang saat itu merupakan Pangdam Wirabuana lantang melontarkan ide tentang penciptaan fungsi teritorial TNI dan tegas menyatakan tak setuju dengan gagasan pemekaran kodam (Tempo 2019, 25). Karena Komando teritorial tidak sesuai dengan tujuan dari UU 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Dimana pembinaan teritorial dan potensi daerah harus dilaksanakan oleh pemerintah sipil. Agus Wirahadikusumah mengungkapkan "Di Jawa tidak perlu lagi ada Kodam (Komando Daerah Militer). Kodam hanya diperlukan di daerah-daerah yang jangkauan pemerintah daerahnya masih terbatas," (Shambazy 1999).

Perdebatan juga terjadi di tubuh militer Indonesia saat kasus dugaan pelanggaran HAM di kerusuhan September 1999 pasca jajak pendapat/referendum Timor-Timor. Pada Desember 1999 Komisi penyelidikan pelanggaran HAM memanggil para senior Perwira Tinggi TNI termasuk Pangab saat itu Jenderal Wiranto untuk dimintai keterangan sebagai kapasitasnya yang menjadi pimpinan utama militer Indonesia. Pemanggilan ini mendapatkan reaksi dari Pangkostrad saat itu Letjen Djaja Suparman yang mengatakan pemanggilan ini dapat membuat Prajurit marah dan dapat bereaksimembabi buta merugikan rakyat biasa. "Bukan hanya prajurit biasa, saya juga merasa sakit hati," katanya, menambahkan dengan gaya militer tradisional bahwa ia mencium adanya konspirasi yang melibatkan elit-elit asing dan dalam negeri yang bertujuan secara sistematis untuk menghancurkan TNI (Crouch 2000, 131).

Komentar ini kemudian direspon oleh Majjen Agus Wirahadikusumah selaku Pangdam VII/Wirabuana bahwa "Prajurit kita bukan prajurit hulu-balang rezim dan bukan prajuritnya Jenderal" (Tempo 2019, 26). Bahwa prajurit TNI mengabdikan pada institusi negara bukan pada Jenderal. Ini juga sesuai dengan cita-cita reformasi yang salah satunya supremasi hukum dan setiap orang sama di mata hukum baik itu sipil atau militer termasuk pejabat tinggi militer seperti Jenderal pun harus tunduk pada aturan hukum. Perdebatan ini pun menjadikan memperburuk posisi Agus Wirahadikusumah terkesan radikal sebagai kelompok minoritas di dalam tubuh militer.

Dalam wawancara dengan wartawan Kompas Budiarto Shambazy pada 19 Desember 1999. Bahwa kritik hujatan yang diarahkan pada militer (TNI) tidak melemahkan atau bahkan menghancurkan institusi tersebut yang merupakan bagian dari negara layaknya dua sisi koin mata uang. Agus Wirahadikusumah menilai bahwa selama ini militer kurang mau mendengar luapan kekecewaan masyarakat. Tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf ke masyarakat, bersikap normatif yang menilai bahwa semua perbuatan militer merupakan bagian dari tugas negara dalam format politik Orde Baru. "Jika memang ada pelanggaran, TNI harus mempertanggungjawabkannya secara hukum, kalau tidak ada yang berani, saya sebagai pimpinan mengatakan saya siap diadili. Kalau perlu saya siap dipenjara, jika prajurit paya memang terbukti melanggar hukum" (Shambazy 1999).

Jika kita amati bersama perubahan radikal Agus Wirahadikusumah dimulai penerbitan buku "TNI: Pemikiran Masa Depan Pada 26 Oktober 1999, saat peluncuran buku karyanya berjudul "Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan" pernyataannya yang keras mengenai "Dwi Fungsi ada anak haram yang terlanjur lahir"

Sikap progresif dan terkesan radikal ini membuat rekan reformisnya Susilo Bambang Yudhoyono pun mundur dari dukungan prinsip Agus. Bahkan mencabut tulisannya dalam kata pengantar buku tersebut pada saat-saat akhir ketika buku sudah dicetak. Agus agak kecewa, tapi buku tetap diterbitkan tanpa ada jejak serta keterlibatan SBY (Pembaruan 2004).

Agus wirahadikusumah tidak hanya mengkritik petinggi-petinggi militer yang secara karakter lemah, akibat kritikan dari publik terhadap Dwi Fungsi melainkan juga menyarankan

mundur Menkopolkam saat itu Jenderal Wiranto yang merupakan masih aktif Jenderal Penuh bintang empat dan juga atasannya karena kasus penyelidikan Pelanggaran Ham paska referendum Timor- Timor 30 Agustus 1999 (Rinakit 2005, 147-148).

Presiden Abdurrahman Wahid tertarik dengan pemikiran Agus Wirahadikusumah. Dalam rekaman video wawancara dengan sejumlah jurnalis Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan :“Karena dia(Agus) pemikir yang baik. Tapi ya saya tidak tahu kapasitasnya di Kostrad, itu urusan Panglima TNI dan Kasad, Tapi kalau saya suruh dia di Jakarta, betul saya minta” (Reuters 2000, 29 Februari).

Puncaknya ketika pada Maret 2000 Agus Wirahadikusumah terbukti diangkat menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) dengan promosi kenaikan satu tingkat dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal (Soekarno, 2019, 116). Tindakan ini menjadi intervensi sipil terhadap sifat khusus militer yaitu otonomi internal mengenai mutasi promosi jabatan.

Lejten Endriartono sutarto mengatakan ‘Dia melawan atasan secara terbuka. Kita bisa saja berdebat habis-habisan dalam proses memilih kebijakan, tapi sekali keputusan sudah ditetapkan oleh pimpinan, semua staf harus mendukung. Yang dilakukan Agus adalah mendebat pimpinan dan memublikasikan pendapatnya. Itu betul-betul sudah di luar etika kemiliteran’ (Said 2013, 554).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Akademisi Universitas Deakin Dr. Damien Kingsbury, Agus Wirahadikusumah dinilai terlalu berani dan terlalu reformis. Dr. Damien Kingsbury menilai bahwa militer Indonesia memiliki beberapa faksi yang memiliki kepentingan kelompok sendiri-sendiri dalam baik dalam ranah politik, ekonomi dan sosial (Kingsbury 2022). Namun satu hal yang penting, jika itu mengganggu kesoliditas institusi, militer akan sangat bersifat konservatif melindungi kepentingan *corporate professionalism* sesuai dengan karakteristik *The arbitrator – type of praetorian army* (tipe tentara pretorian penengah). dan bersifat konservatif terhadap otonomi internalnya yang eksklusif / *corporate professionalism*.

Kesimpulan

Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah lahir di Bandung tanggal 17 Oktober 1951. Beliau anak ke-5 dari 12 putra-putri R. Maryun Wirahadikusumah S.H. dan H. Siti Rokaat. Kakeknya R. Ranga Wirahadikusumah seorang Wedana Kolonial Belanda setingkat bupati cukup terpandang dengan gelar Raden. Ia juga merupakan keponakan Umar Wirahadikusumah Pangkostrad ke-2 dan wakil Presiden RI ke-4 (1983-1988). Menikah dengan Tri Racmaningsih dan dikarunia anak bernama Dyah Gustinar Savitri, lahir pada 14 Juli 1975 dan Yunan Mahastra Satria pada 22 Juni 1977. Pendidikan formalnya SD (1963). SMP (1966). SMA (1969). Akabri-Darat 1970 dan lulus pada tanggal 11 Desember 1973. Magister dengan gelar Master of Public Administration di Kennedy school of government, Harvard University US (1992). Pendidikan militer Sussarcab Inf (1974), Susdankipan (1979) dan Susdanyonif (1988) di Pussenif Cimahi Jawa Barat. Pendidikan Ranger, Airborne, Pathfinder (1981) dan Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning Georgia US (1983). Air Assault di Fort Campbell Kentucky US (1984). Specialized English Course dan tugas observasi Non-Commissioned Officer Development and Management System di lingkungan US Army (1985). Pendidikan di Seskoad Bandung (1988). Army Command dan Staff College di Australia (1990).

Karir militer Agus Wirahadikusumah setelah lulus Akabri-Darat dengan pangkat Letda (11-12-1973). Danton di Yonif Raider Lintas Medan 509/Balawara Yudha Kodam VIII/Brawijaya (saat ini menjadi Kodam V/Brawijaya) 1974-1975. Dantonban Ki Lt Brigif 2 Kodam VIII/Brawijaya 1975-1976. Danton I/Kompi C/ Yonif Raider Lintas Medan 507 (saat ini menjadi Yonif Raider 500) Kodam VIII/Brawijaya 1976-1977. Promosi menjadi Lettu (1-04-1976). Danki 0/Yonif Raider Lintas Medan 507 Kodam VIII/Brawijaya 1977-1980. Promosi menjadi Kapten (1-04-1979). Kasi Ops Yonif Raider Lintas Medan 507 Kodam VIII/Brawijaya 1980-1981. Pasi 2/Organisasi Brigif 2 Kodam

VIII/Brawijaya 1981-1984. Gumil Golongan IV di Pussenif di Cimahi Jawa Barat 1984-1985. Kasidik Bangpes Pussenif 1985-1987. Promosi menjadi Mayor (1-10-1985). Wadanyonif Linud-328 Dirgahayu/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 328/Dirgahayu) 1 Mei 1987-1 Juni 1987. Wadanyonif Linud-305 Tengkorak/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 305/Tengkorak) 1 Juni 1987-1 November 1987. Danyonif Linud-330 Tri Dharma/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 330/Tri Dharma). Danyonif Linud-330 Tri Dharma/Brigif-17 Kostrad(kini Yonif Para Raider 330/Tri Dharma/Brigrif-17 Kostrad) 1 November 1987-1 Februari 1988. Danyonif Linud-305 Tengkorak/Brigif-17 Kostrad (kini Yonif Para Raider 305-Tengkorak Kostrad) 1 Februari 1988-1 Juli 1988. Pamen Makostrad 1 Juli 1988-1 Juni 1989. Dosen Golongan IV di Seskoad 1 Juni 1989-1 Juni 1993. Promosi menjadi Letkol (1-10-1989). Pakor Sahli Dispenad 1 Juni 1993-1 Agustus 1994. Promosi menjadi Kolonel (1-10-1993). Asops Kasdam VII/Wirabuana 1 Agustus 1994-1 April 1995. Danrem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana 1 April 1995-1 Maret 1996. Waasrenum Pangab 1 Maret 1996-1 Januari 1998. Promosi menjadi Brigjen (1-03-1996). T.A Tk. III Sahli Pangab Bidang Polkam 1 Januari 1998-15 September 1998. Promosi menjadi Mayjen (1-01-1998). Danseskoad 15 September 1998-1 Januari 1999. Asrenum Pangab 1 Januari 1999-1 November 1999. Pangdam VII/Wirabuana 1 November 1999-1 April 2000. Pangkostrad 1 April 2000-1 Agustus 2000. Promosi menjadi Letjen (1-04-2000).

Pemikiran Reformis militer Agus Wirahadikusumah selama tahun 1998-2000 dapat ditelusuri dari empat karya buku yang berjudul, Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad 1992-1993 terbit tahun 1993, ABRI Profesional dan Dedikatif terbit tahun 1998, ABRI dan Agenda Perubahan terbit tahun 1999, Indonesia Baru dan Tantangan TNI terbit tahun 1999.

Gasasinya dalam menuju Indonesia baru yang ditandai dengan *civil society*, pemberdayaan masyarakat melalui Revisi Doktrin Sishankamrata penafsiran ulang Komando Teritorial sesuai dengan UU Otonomi daerah yang menyerahkan pembinaan teritorial kepada pihak sipil. Tapi upayanya gagal dalam memprofesionalkan militer Indonesia (TNI) karena dinilai terlalu bermain politik diluar kebijakan militer. ini menjadikan konflik antara personal, sedangkan ruh akar permasalahannya yaitu Doktrin Sishankamrata tidak tersentuh,

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anwar, Dewi Fortuna. "Negotiating and Consolidating Democratic Civilian Control of the Indonesian Military." *East-West Center Occasional Papers Politic and Security Series*, 2001: 1-44.
- Azca, Muhammad Najib. "Security Sector Reform, Democratic Transition and Social Violence The Case of Ambon, Indonesia." *Security Sector Reform Potentials and Challenges for Conflict Transformation* (Berghof Research Center for Constructive Conflict Management), 2004: 35-44.
- Crouch, Harold. "Indonesia: Democratization and the Threat of Disintegration." *Southeast Asian Affairs*, 2000: 115-133.
- Gnoli, Claudio. "Mentefacts As A Missing Level In Theory Of Information Science." *Theory Of Information Science* (Emerald publication), 2018: 18.
- Haseman, John B. "*Indonesian Military Reform: More Than a Human Rights Issue.*" *Southeast Asian Affairs* (Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)), 2006: 111-125
- Indrawan, Jerry. "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan." *Jurnal Pertahanan*, 2015: 93-113.
- Inkiriwang, Frega Wenas. "The Dynamic Of The Us-Indonesia Defence Relations: The 'Imet Ban' Period." *Australian Journal of International Affairs*, 2020: 377-393.
- Perlmutter, Amos. "The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities." *Comparative Politics* (Ph.D. Program in Political Science of

the City University of New York), April 1969: 382-404
Rifqa Deni Amanah, Hasanuddin. "Politics Military In Post – New Order Indonesia." *JOM FISIP UNRI*, 2014: 1-13.

Buku

- Basuki, Ahmad Yani. *Reformasi TNI: Pola, Profesionalisme. Refungsionalisasi Militer dalam masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Daliman A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2018.
- Hisyam, Usamah. *SBY Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena Publishing, 2004.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kadi, Saurip. *TNI-AD Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: Grafiti: Pusat Studi Masalah-Masalah Militer, 2000.
- Kristiadi, Rizal Sukma & J. *Hubungan Sipil-Militer Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia: Persepsi Sipil Dan Militer*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1999
- Mietzner, Marcus. *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Washington: the East-West Center Washington, 2006 .
- Pusjarah TNI. *Sejarah Reformasi TNI*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2014.
- Rinakit, Sukardi. *The Indonesian Military After The New Order*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Solichien, dkk. *ABRI Profesional dan Dedikatif*. Jakarta: Cadaka Dharma, 1998.
- Said, Salim. *Dari Gestapu ke Reformasi*. Bandung: Penerbit Mizan, 2013
- Soekarno, dkk. "The Policy Abdurrahman Wahid About Indonesian Military Years 1999-2001." *Historica* (History education program, University of Jember) Volume 3, no. Issue 1 (2019): 115-124.
- Suparman, Djadja. *Catatan Harian Letnan Jenderal (Purn) Djadja Suparman*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Tempo, Pusat Data dan Analisa. *Jenderal Agus Wirahadikusumah Prajurit Idealis Sekaligus Tokoh Antagonis TNI*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- TNI, Mabes. *Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa (Tahap II)*. Jakarta: Mabes TNI, 2001.
- Wirahadikusumah dkk. *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Wawancara

Kingsbury, Damien, interview by Tegar Haedar. *Militer Indonesia selama periode 1998-2000*. (Kamis 26 Mei 2022).

Surat Kabar Elektronik

- Detikcom. *Seminar Hubungan Sipil-Militer FISIP UI TNI "Bertobat" di UI Depok*. Jakarta, 25 Mei 1999.
- Musakabe, Herman. *Reformis dan Pemikir yang Mendahului zamannya*. Jakarta: Kompas, 2001.
- POS. *Tantangan TNI, Cabut Dwifungsi*. Jakarta, 1 November 1999.
- Reuters. "Indonesia: Former Military Chief General Wiranto Defends His Role In East Timor In Front Of A Parliamentary Commission." Jakarta, 2000.
- Shambazy, Budiarto. *Lebih Jauh Dengan*. Jakarta: Kompas, 1999, 2.
- Wirahadikusumah, Agus. *ABRI dan Civil Society*. Jakarta: Harian Merdeka, 1999.